RESUME HUKUM TATA NEGARA

Nama : Reza Ananda

Nim : 10200120231

Materi 1

-istilah hukum tata negara

Istilah Hukum tata negara terbagimenjadi 4 yaitu;

- *Staatrecht (Belanda)
- *Constitiunal Law (Inggris)
- *Droit Contituionnel (Perancis)
- *Verfassungsrecht (Jerman)

-Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur sebuah kenegaraan atau organisasi suatu negara yang berkaitan penuh dengan negara tersebut.

Adapun pengertian Hukum tata negara menurut para ahli

-Van der por

Hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan kewenangannya masing-masing hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan warga negara

-Paul Scholten

Hukum yang mengatur sebuah mengenai organisasi negara

-J.H.A. Logemann

Hukum yang mengatur mengenai sebuah organisasi negara

-Ruang lingkup kajian

Lembaga negara adalah Lembaga lembaga yang di bentuk oleh peraturan rendah dan terdapat dalam negara

Konstitusi adalah sebuah norma system politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara dan sebagai dokumenter tertulis

Bentuk pemerintahan adalah republik sedangkan sistem pemerintahan presidensial

-Hubungan dengan ilmu Lainnya

Ilmu negara adalah ilmu yang memiliki pengetahuan yang menyelidiki asas negara. Hubungan baik Hukum tata negara maupun ilmunya sama sama menjadikan obyeknya.

Ilmu politik hampir sama dengan Ilmu negara masing masing menyelidiki sebuah negara tapi perbedaannya hanya metode yang digunakan

Materi 2

-Sumber Hukum tata negara

Tidak semua negara memiliki sumber hukum yang sama karena sumber hukum negara dipengaruhi oleh tradisi atau sistem yang digunakan, Misalnya negara dengan Hukum common law akan sangat berbeda dengan civil law. Bagi negara common law yang paling utama adalah yurisprudensi, sedangkan civil law yang menjadi yang utama adalah hukum tertulis.

-Sumber Hukum Tata negara Indonesia

Sumber hukum tata negara Indonesia terbagi menjadi 2 yaitu;

-Sumber Hukum Materiil adalah

-Sumber Hukum Formil

Sumber hukum formil adalah sumber atau tempat terbentuknya sebuah peraturan hukum dan menjadi penegasan akan berlakunya hukum materiil yang menentukan isi kaidah hukum tata negara yang menjadikan dasar pandangan hidup seperti Pancasila.

Sumber Hukum dalam arti formal adalah hukum yang dalam bentuk tertulis dan tumbuh dan di pertahankan oleh masyarakat, adat dan budaya

-Hierarki Peraturan perundangundangan

-UUD NkRI TAHUN 1945

-KETetapan MPR

-UU PERPU

-PERATURAN PEMERINTAHAN

-PERATURAN PRESIDEN

-PERDA PROVINSI

-PERDA KABUPATEN

Traktat

Adalah kesepakatan atau perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih dan melakukan perundingan, penandatanganan, dan pengesahan.

Doktrin

Adalah pendapat para pakar hukum dalam bidangnya dan telah diakui secara umum

Materi 3

Asas-asas Hukum tata negara

Pengertian asas hukum tata negara adalah dasar atau landasan yang menjadi pedoman atas lahirnya etis hukum dan menjadi jembatan untuk masyarakat untuk memahami etis hukum karena mempelajari asas-asahukum

Fungsi asas hukum

- Sebagai penjaga konsistensi
- Sebagai jantung dari peraturan hukum
- Sebagai ratio legis

ASAS PANCASILA

Asas Pancasila salah satu hukum tata negara yang seluruh penyelenggaraannya negara harus sesuai dengan Pancasila dan tidak boleh menyimpang dari hal penting tersebut

ASAS NEGARA

Asas ini menjadi bukti bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan bukan negara federal, asas negara bermakna bahwa seluruh sikap dari seluruh elemen harus sesuai dengan prinsip kesatuan.

ASAS KEDAULATAN

Adalah Asas yang menunjukkan bahwa kekuatan negara ada di tangan rakyat, untuk rakyat, oleh rakyat dan menjunjung tinggi perlindungan HAM

ASAS PEMISAHAN KEKUASAAN

Adalah asas yang menjadi penyeimbang seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan

Materi 4

Sejarah ketatanegaraan Indonesia

1. UUD 1945

Sejarah terbentuknya UUD 1945 pada masa pendudukan pemerintahan bala tentara Jepang, selalu mempropagandakan bahwa kedatangannya di Indonesia tidak akan menjajah tetapi justru membebaskan bangsa Indonesia yang dikatakan sebagai saudara mudanya dari belenggu penjajahan Belanda. Pada 7 September 1944 Jepang menjanjikan akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia pada tanggal 24 September 1945.

Namun belum lagi terlaksana rencana kemerdekaan itu, terjadilah perubahan situasi pada tanggal 6 agustus 1945 di Hiroshima, Jepang dan pada tanggal 9 agustus di Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu dan pada tanggal 15 agustus 1945 Jepang terpaksa menyerah tanpa syarat pada sekutu.

Saat antara Jepang dijatuhi bom dan sebelum pihak sekutu menduduki Indonesia, dipergunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Atas dasar proklamasi tersebut lahir dan berdirilah Negara Republik Indonesia dan lahir pula Tata Hukum Indonesia. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, yaitu pada tanggal 18 agustus 1945, disahkanlah atau ditentukan UUD bagi Negara RI oleh PPKI yang naskah dan rancangannya telah dipersiapkan oleh BPUPKI.

Disadari oleh pembentuk UUD bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Negara sebagaimana telah ditentukan di dalam UUD, tentu saja tidak akan dapat sekaligus dilaksanakan sepenuhnya dalam waktu yang singkat, untuk itu masih diperlukan masa-masa peralihan dan pembentuk UUD.

2. PERGESERAN KEKUASAAN PEMERINTAH

Kabinet presidential yang dipimpin oleh presiden ternyata tidak berjalan lama, keadaan pada waktu itu sangat genting terutama sikap dan niat Belanda yang menginginkan kembali menjajah Indonesia. Menanggapi hal itu, maka dikeluarkanlah maklumat wakil presiden nomor 10 tanggal 16 oktober 1945 tentang pemberian kekuasaan legislative kepada KNP atas usul komite nasional pusat.

Isi maklumat wakil presiden itu adalah :

“Bahwa KNP sebelum terbentuk MPR dan DPR di serahi kekuasaan legislative dan ikut menetapkan garis-garis besar dari haluan Negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan KNP sehari-hari berhubungan dengan gentingnya keadaan, di jalankan oleh sebuah Badan Pengawas yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab pada KNP.”

Maklumat nomor 10 tahun 1945 adalah mengurangi kekuasaan presiden yang semula berdasarkan pasal IV aturan peralihan adalah sangat luas. Pengurangan ini terjadi dengan tanpa mengubah ketentuan pasal IV aturan peralihan, baik mengubah secara langsung maupun mengubah secara amandemen.

Perubahan yang kedua terjadi pada tanggal 14 November 1945 ketika Badan Pengawas mengusulkan pada presiden adanya system pertanggung jawaban menteri-menteri kepada parlemen yaitu KNP.

KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Dalam rangka persiapan usaha untuk membentuk Negara RIS oleh Belanda telah dapat dibentuk :

- Negara Indonesia Timur (1946)
- Negara Sumatera Timur (1947)

- Negara Pasundan (1948)
- Negara Sumatera Selatan (1948)
- Negara Jawa Timur (1948)
- Negara Madura (1948)

Negara-negara tersebut yang kemudian tergabung dalam *Bijeenkomst Voor Federal Overleg* (BFO) atau pertemuan untuk pemusyawaratan federal, yang merupakan aliran federalism atas usaha Belanda.

UUDS 1950

Negara RIS yang berdiri pada tanggal 27 desember 1949 ternyata umurnya tidak lama, bentuk susunan federal bukan bentuk yang berakar pada keinginan rakyat, sehingga dimana-mana timbul tuntutan untuk kembali pada bentuk Negara kesatuan.

Untuk melaksanakan kembali Negara kesatuan, kemudian diadakan musyawarah antara pemerintah RIS dengan yang bertindak juga sebagai kuasa dari pemerintah Negara Indonesia Timur dan Sumatera Timur dengan perintah Republik Indonesia. Dalam pemusyawaratan itu dicapai suatu hasil keputusan bersama yaitu persetujuan 19 Mei 1950, yang pada pokoknya disetujui dalam waktu sesingkat-singkatnya untuk bersama-sama melaksanakan Negara kesatuan, sebagai jelmaan dari Negara RI berdasarkan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 dengan cara merubah kontitusi RIS menjadi UUDS.

Dalam system UUDS 1950 yang menganut system parlementer ini terdapat banyak sekali partai politik dan organisasi politik yang berbeda satu dengan yang lain. Pada 1957 terdaftar dalam buku kepartaian Indonesia tidak kurang dari 27 Partai politik dan setelah pemilu di dalam badan konstituante terdapat 35 fraksi. Dengan banyaknya partai harus selalu di usahakan untuk mengumpulkan kerjasama dari partai-partai yang bersedia bekerjasama mendukung cabinet untuk memperoleh suara mayoritas dalam DPR. Akibat kerjasama dari banyak partai ini sukar diperoleh dukungan yang sifatnya stabil, akibatnya cabinet sering berganti, dari cabinet Natsir (1950) sampai dengan tahun 1959 telah terjadi pergantian setidaknya 7 kabinet.

BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945

Dengan berlakunya kembali UUD 1945, berarti system ketatanegaraan berubah pula dari system parlementer menjadi system presidential menurut UUD 1945 dan untuk itu perlu alat-alat perlengkapan Negara menurut UUD 1945. Oleh karena itu kemudian di tetapkan dengan Perpres nomor 3 tentang Pembaharuan Susunan DPR, kemudian dengan Perpres nomor 4/1960 di tetapkan susunan DPRGR yang keanggotaannya diangkat dan di berhentikan oleh presiden.

Materi 5

A. Sejarah Konstitusi

1. Warisan Yunani Kuno (Plato dan Aristoteles)

Karya-karya Plato seperti *Republic* dan *Nomoi* terdapat pula dialog-dialog yang diberi judul “*Politicus*” atau “*stateman*” yang memuat tema-tema yang berkaitan erat dengan gagasan konstitusionalisme. Dalam “*Republic*” menguraikan gagasan *the best possible state* dan dalam “*nomoi*” negara dalam bentuknya sebagai *the second best* dengan menekankan pentingnya hukum yang bersifat membatasi.

Karya Aristoteles “*Rethorica*” menginginkan seorang pemimpin yang ideal “supermen dan berbudi luhur

2. Warisan Romawi Kuno (Cicero)

Pengembangan dari ajaran Plato dan Aristoteles yang memisahkan antara hukum dan Negara. Hukum mempunyai kedudukan tertinggi

3. Warisan Islam: Konstitusionalisme dan Piagam

1. Piagam Madinah (Madinah Charter)=*al-Shahifah* terdiri dari 47 pasal yang berisi perjanjian masyarakat Madinah pada 622 M ada 13 kelompok yang secara eksplisit disebut dalam teks piagam. Menghargai keanekaragaman ras dan agama serta bersatu dalam menghadapi musuh

4. Gagasan Modern

B. Arti dan Pengertian Konstitusi

Konstitusi berasal dari bahasa latin “*constitutio*” yang berarti hukum atau prinsip

Menurut istilah pandangan beberapa sarjana berlainan namun pada intinya adalah konstitusi adalah tidak saja aturan yang tertulis, tetapi juga apa yang dipraktikkan dalam kegiatan negara dan yang diatur itu tidak saja berkenaan dengan organ negara beserta komposisi dan fungsinya, baik di tingkat pusat maupun di tingkat pemda tetapi juga mekanisme hubungan antar negara atau organ itu dengan warga negara.

C. Nilai dan Sifat Konstitusi

Nilai konstitusi seperti yang dikemukakan Karl Loewenstein dalam bukunya *Reflection on the value of Constitution* adalah (i) *normative value* (ii) *nominal value* dan (iii) *semantical value*.

Sifat konstitusi yaitu lentur (*flexibel*) atau kaku (*rigid*), tertulis atau tidak tertulis, formal atau materiil

D. Tujuan dan Hakikat Konstitusi

Dikalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu: (i) keadilan (*justice*) yang sepadan dengan keseimbangan dan kepatutan serta kewajaran; (ii) kepastian yang hukum terkait dengan ketertiban dan ketentraman. Sementara itu kegunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.

Materi 6

Organ dan fungsi kekuasaan negara

Lembaga Eksekutif adalah lembaga yang bertugas untuk melaksanakan kebijakan, peraturan, dan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Presiden, wakil presiden, dan menteri-menterinya adalah lembaga eksekutif yang menjalankan suatu pemerintahan.

Lembaga eksekutif ini punya kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan.

Contoh Lembaga Eksekutif

Beberapa contoh lembaga eksekutif diantaranya:

1. Presiden

Presiden adalah kepala negara dan kepala pemerintahan yang menjalankan roda pemerintahan suatu negara. Presiden memiliki masa jabatan selama 5 tahun untuk satu periode. Namun, ia masih diperbolehkan untuk mengajukan diri sebagai presiden kembali untuk periode berikutnya.

2. Wakil presiden

Wakil presiden adalah jabatan yang satu tingkat berada di bawah presiden. Wakil presiden dapat mengambil alih tugas dan jabatan presiden bila Presiden berhalangan.

3. Menteri

Menteri adalah jabatan politik yang memegang suatu jabatan publik signifikan dalam pemerintah. Menteri biasanya memimpin suatu kementerian dan dapat merupakan anggota dari suatu kabinet, yang umumnya dipimpin oleh seorang presiden, atau perdana menteri.

Legislatif adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk merumuskan dan membuat peraturan, kebijakan, dan Undang-Undang suatu negara. Sebagai badan deliberatif pemerintah, lembaga ini memiliki kuasa dalam membuat hukum di suatu negara.

Contoh Lembaga Legislatif

Beberapa contoh lembaga eksekutif di Indonesia adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPR adalah mereka yang menjadi anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta Pemilu dan terpilih.

Tugas DPR diantaranya:

1. Memilih anggota BPK secara langsung.
2. Mengajukan tiga orang hakim konstitusi.
3. Memberi persetujuan kepada Presiden untuk pernyataan perang, damai, dan perjanjian dengan negara lain.

Mengusulkan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden.

2. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah lembaga legislatif perwakilan daerah yang memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Anggota DPD merupakan perwakilan dari masing-masing provinsi yang terpilih saat PEMILU.

Tugas DPD diantaranya:

1. Mengajukan rancangan UUD yang berhubungan dengan otonomi daerah dan mengawasi pelaksanaannya.
2. Memeriksa hasil keuangan negara melalui BPK.
3. Memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai RUU APBN

4. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

MPR adalah lembaga legislatif yang di dalamnya terdiri dari anggota DPR dan DPD yang terpilih dalam PEMILU. MPR bertugas membuat UUD, peraturan, dan kebijakan.

Tugas MPR diantaranya:

1. Membuat, menetapkan, dan mengubah UUD.
2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden.
3. memberhentikan Presiden dan Wakil presiden sesuai dengan UUD.